

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat dari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah pembangunan manusia seutuhnya seperti yang tersirat dalam UUD 1945. Dalam rangka pencapaian hal itulah pemerintah mencanangkan Pembangunan Jangka Panjang (PJP). Di dalam masa ini, masyarakat dan bangsa kita memasuki tahap pembangunan nasional penting, untuk itu diperlukan pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan yang perlu dirumuskan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan yang termasuk bidang yang sangat vital. Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan penduduk terbesar di dunia dimana diperkirakan jumlah penduduknya 210 jiwa. Jumlah yang demikian besar merupakan modal besar bagi pembangunan sekaligus potensi konflik yang besar. Apabila jumlah penduduk sebesar ini dapat berdaya guna secara tepat maka akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat Indonesia melalui pembangunan. akan tetapi hal itu sulit dicapai karena rendahnya kualitas produktivitas masyarakat Indonesia, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka.

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan

kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih menghadapi masalah pendidikan yang berat, terutama berkaitan dengan kualitas, relevansi dan efisiensi pendidikan.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada bab II pasal 2 dan pasal 3 dijelaskan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2 :

“Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Pasal 3 :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹

Untuk dapat melaksanakan undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan sebaik-baiknya ada visi dan misi yang dijadikan acuan agar tercipta sistem pendidikan yang baik dan teratur guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun visi tersebut yaitu :

“Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

- ☞ Mengupayakan perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- ☞ Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- ☞ Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

- ☞ Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- ☞ Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami pembaruan yaitu digantinya UU No. 2 tahun 1989 dengan UU No. 20 tahun 2003. Hal ini disebabkan bahwa Undang Undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembaruan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam UU No. 20 tahun 2003 meliputi :

- Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
- Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
- Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- Evaluasi akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
- Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
- Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
- Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.

- Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
- Pemberdayaan peran masyarakat.
- Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat.
- Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sistem pendidikan Nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi tiap-tiap warga RI, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang meliputi kemampuan membaca, menulis, menghitung serta menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 45 pasal 31(1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sistem pendidikan Nasional memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam penerimaan seseorang menjadi peserta didik tidak boleh adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, bangsa, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan.

Kebijakan pembangunan Pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun dan pemberian akses

yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan.

Kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin yang selanjutnya akan menghambat upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun karena penduduk miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh sebab itu program PKPS-BBM bidang pendidikan perlu dilanjutkan.

Kemajuan pendidikan di kabupaten Kulon Progo cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Kulon Progo merupakan salah satu daerah yang memperoleh Bantuan program BOS.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekwensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2005, APK tingkat SMP baru mencapai 85,22%, sedangkan target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada tahun 2008-2009 dengan APK minimum 95%. Dengan demikian pada saat ini masih ada sekitar 14,78% (sekitar 1,9 juta) anak usia 13-15 tahun yang masih belum sekolah yang harus kita tarik untuk masuk ke bangku sekolah. Selain

masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan sehubungan dengan program penuntasan Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri maupun swasta dan pesantren salafiyah serta sekolah keagamaan non islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar 9 Tahun.

Pendidikan merupakan program strategis jangka panjang. Oleh karena itu, kerja dan perbaikan serta peningkatan bidang pendidikan tidak bisa dijalankan secara reaktif, sambil lalu dan sekenanya, melainkan mesti dengan cara proaktif, intensif dan strategis. Untuk memperoleh hasil yang maksimal sudah saatnya kita tidak hanya memandang pendidikan sebagai sebuah masalah individual lembaga pendidikan formal tetapi juga menjadi masalah bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian sekolah tidak hanya diartikan secara formal institusional melainkan juga berada dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Adanya pergeseran paradigma pendidikan sentralistis menjadi desentralistis menjadikan penanganan pembangunan di bidang pendidikan mengalami perubahan, sebab pembangunan pendidikan diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi dan menangkap peluang dalam kemajuan informasi dan teknologi dimana menuntut kita untuk meningkatkan kualitas SDM apabila tidak mau tertinggal dengan daerah lain.

Untuk menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik harus diimbangi dengan kemampuan lembaga dan tenaga pendidik yang baik sehingga mampu menghasilkan lulusan yang cerdas dan terampil di berbagai jenjang pendidikan.

Jenjang pendidikan yang paling penting adalah pendidikan dasar. Di Indonesia pendidikan dasar telah diatur dalam UU Republik Indonesia No 2 tahun 1984 tentang sistem pendidikan nasional dan PP Republik Indonesia No 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar, dimana pendidikan dasar memiliki fungsi yaitu melalui sekolah dasar anak didik dibekali kemampuan dasar dan sekolah dasar merupakan satuan pendidikan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya.

Kesadaran untuk meningkatkan mutu pendidikan tak cukup hanya dengan menyadarkan pada proses pengelolaan pendidikan yang berjalan apa adanya dan tanpa adanya suatu pengembangan. Selama ini, cukup banyak upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan, Namun tetap masih banyak keterbatasan yang dihadapi para pengelola sekolah dalam merealisasikan keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mereka jalankan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal pendanaan. Selama ini pemerintah khususnya dinas pendidikan masih mengandalkan dana yang berasal dari sumbangan wali murid yang secara langsung. Kondisi tersebut akan mempengaruhi perekonomian masyarakat yang sebagian besar masyarakat ekonomi menengah ke bawah. kondisi tersebut tentunya menuntut perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah.

Kulon Progo merupakan salah satu daerah dari sekian banyak daerah di Indonesia yang mendapatkan pengalokasian program dana BOS. Kulon Progo adalah salah satu kabupaten di D.I Yogyakarta yang memiliki kemajuan pendidikan yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 4,91 % dan terendah terdapat pada tingkat SLTP yaitu sebesar 0,13%, selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 0,16%. Bila dilihat dari angka lulusan ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 99,94% dan terendah pada sekolah tingkat menengah yaitu sebesar 86,7.

Tabel 2.1
Indikator Mutu Pendidikan
tahun 2005/2006

No	Indikator	SD+MI	SLTP+MTs	SMA+MA
1.	Persentase lulusan TK/RA/ABA	87,68		
2.	Angka mengulang	4,91	0,13	0,65
3.	Angka Lulusan	99,94	96,91	86,77
4.	Angka putus sekolah	0,16	0,20	1,23
5.	Angka kelayakan menajar			
	a. Layak	82,33	81,06	73,90
	b. Semi layak	4,75	7,87	17,81
	c. Tidak layak	2,03	11,07	8.18
6.	Persentase kesesuaian guru mengajar			
	a. PPKn	-	100,00	100,00
	b. Pend. Agama	-	100,00	100,00
	c. Bahasa Indonesia	-	100,00	100,00
	d. Bahasa Inggris	-	100,00	100,00
	e. Sejarah dan sejarah Budaya	-	100,00	100,00
	f. Pendidikan jasmani	-	100,00	100,00
	g. Matematika	-	100,00	100,00
	h. IPA	-	100,00	100,00
	h.1. Fisika	-	-	100,00
	h.2. Biologi	-	-	100,00
	h.3. Kimia	-	-	100,00

	i. IPS		100,00	100,00
	i.1 Ekonomi			100,00
	i.2. Sosiologi			100,00
	i.3. Geografi			100,00
	j. Seni dan kerajinan		100,00	100,00
	k. Muatan lokal		100,00	100,00
	l. Tata Negara			100,00
	m. Antropologi			100,00
	n. Pendidikan seni			100,00
	o. Bahasa Asing			100,00
	p. Bdan P		100,00	100,00
	q. Lain-lain		100,00	100,00
7.	Persentase kondisi ruang kelas			
	a. Perpustakaan	40,91	84,34	96,30
	b. Lapangan Olah raga	15,66	48,19	40,74
	c. UKS	76,77	75,90	79,63
	d. Laboratorium	0	116,87	185,119
	e. Ketrampilan	0	0	51,85
	f. Bimbingan penyuluhan	0	0	79,63
	g. Serba Guna	0	0	24,07
	h. Bengkel	0	0	66,67
	i. Ruang praktik	0	0	50,00
9.	Angka partisipasi (persen)			
	a. Pemerintah pusat	4,37	12,58	11,25
	b. Orang tua	2,99	7,89	28,74
	c. Pemerintah daerah	90,88	77,06	50,50
10.	Satuan biaya (000 Rp)	1656,47	2277,95	1785,89

Sumber : Buku profil pendidikan Kab Kulonprogo

Berdasarkan surat keputusan bersama Kepala dinas pendidikan, kepala kantor depag dan dewan pendidikan Kabupaten Kulon Progo No 422.5/059/kpts/2006, kd.12.01//pp.003/981/kpts/2006.422.5/28/kpts/2006 banyaknya sekolah penerima dana program BOS diKabupaen Kulonprogo adalah sebagai berikut :

SD sebanyak 365, MI sebanyak 27, Salafiah sebanyak 3, dan SLB setara SD sebanyak 6 sedangkan SMP sebanyak 68, Mts sebanyak , Salafiah setara SMP sebanyak 3 dan SLB setara SMP sebanyak 6 jadi secara keseluruhan jumlah

SD sederajat penerima dana BOS di Kabupaten Kulonprogo sebanyak 411 sekolah, dan SMP sebanyak 88 sekolah.

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan semakin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin dan daerah dengan pembangunan sekolah yang sangat langka.

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang ada dalam proses implementasi program BOS. Permasalahan utama yang paling sering dijumpai adalah masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat penerima BOS sehingga sering terjadinya kesalahfahaman antara pemerintah dengan masyarakat mengenai tujuan dan fungsi program BOS. Selain itu struktur birokrasi yang kaku dan tidak transparan mengakibatkan banyak pihak yang enggan untuk bersentuhan langsung dengan BOS. Mereka takut melakukan sebuah kesalahan dalam mempertanggung jawabkan keuangan BOS karena akan ada sanksi yang akan mereka terima apabila memang terbukti melakukan kesalahan.

Dengan adanya BOS dikaitkan dengan gerakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, setiap pihak yang melaksanakan program pendidikan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajib

2. Melalui BOS, tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dikeluarkan oleh sekolah.
3. Anak lulusan SD/MI/SDLB, harus dijamin kelangsungan pendidikannya ke tingkat SMP/MTs/SMPLB. Tidak boleh ada siswa miskin yang tidak melanjutkan ke SMP dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.
4. Kepala sekolah diharapkan mencari dan mengajak siswa SD/MI yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah ke SMP/MTs. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana tambahan (bersama-sama BOS) untuk menuntaskan Wajar Diknas 9 tahun secepatnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah adalah suatu keadaan yang mendorong kita untuk membahasnya. Menurut Winarno Surachman masalah adalah: "Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jelas apabila akan berjalan terus."²

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi program dana BOS di Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kulon Progo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu aktifitas pasti memiliki tujuan yang menjadi sasaran dari aktifitas tersebut. Sehubungan dengan itu maka penelitian tentang dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan ditingkat dasar kabupaten Kulon Progo memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui bagaimana implementasi program dana BOS di Kulonprogo
2. Mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemenasi program BOS.

D. MANFAAT

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari studi ilmu dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.
2. Secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengupayakan peningkatan kualitas / mutu pendidikan secara lebih baik lagi.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan di dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar. Kerangka dasar teori merupakan uraian

yang menjelaskan variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep tertentu. Penulis mencoba menjelaskan tentang teori dari pendapat :

- ❖ Definisi Teori Menurut Masri Singaribun dan Sofyan Efendi adalah³ :
“Serangkaian asumsi, konsep dan definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.
- ❖ Definisi Teori Menurut Koentjoroningrat adalah:⁴ “Suatu pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau di beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”

Dari pengertian teori diatas, mengandung 3 hal yaitu :

- Pertama : Teori adalah serangkaian proporsi antar konsep-konsep yang saling berhubungan.
- Kedua : Teori menerangkan secara sistematis atau suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
- Ketiga : Teori dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi teori diatas, maka kerangka dasar teori dari penelitian ini adalah:

³ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, Hal 37

⁴ Koentjoroningrat *Metode Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta, Gramedia 1997 hal 9

E.1. Implementasi Kebijakan

a. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah.

Pendapat lain mengatakan kebijakan adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah mengenai problem yang nampak. Sedangkan menurut Hein dan Eulau policy adalah:⁵

“Suatu keputusan yang tetap ditandai dengan adanya perhubungan dan keberulangan pada bagian dari keduanya yang membuat tunduk padanya. Policy menurut James E. Anderson adalah:⁶

“Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang / sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah.”

Sedangkan Menurut Bill Jenkins adalah:

“Sekelompok keputusan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor menyangkut pemulihan tujuan tertentu dimana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya harus berada dalam rentang kesanggupan aktor-aktor ini untuk mewujudkannya.”

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

⁵ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta, Grafindo, 1992, hal 26

⁶ *IT Affair Cases, Policy, Process and Formulation* (Sumber: Modul 1, Program MIPA, Universitas

Program BOS merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Tujuan utama dari implementasi program BOS adalah membebaskan biaya pendidikan bagi mereka para siswa yang kurang mampu dan untuk meringankan siswa lainnya agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai lulus dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

Selain itu, sasaran BOS adalah semua sekolah tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Sedangkan besarnya jumlah dana BOS yang diterima dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- ☆ SD/MI/SDLB/ sekolah keagamaan non islam setara SD sebesar Rp 235.000/siswa/tahun
- ☆ SMP/MTs/SMPLB/ sekolah keagamaan non islam setara SMP sebesar Rp 324.000

b. Implementasi Kebijakan

Dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Juni 2005, pemerintah Indonesia mengalihkan sebagian dari subsidi BBM untuk pendidikan melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-

Mulai bulan Juli 2005 PKPS-BBM bidang pendidikan diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program ini diharapkan program Wajar 9 Tahun dapat dituntaskan sesuai dengan rencana.

Dalam implementasinya, sebuah kebijakan / program memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, Adapun factor-faktor tersebut adalah:

a. Sumber daya,

Sumberdaya yang dimaksud meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan implementasi sebuah kebijakan tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dana, daya dan tenaga sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan sebuah kebijakan. Hal tersebut juga terjadi didalam organisasi pemerintah baik di pusat maupun didaerah. Setiap departemen atau lembaga selalu berusaha untuk mendapat dana, daya dan tenaga untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat

b. Struktur Birokrasi

birokrasi suatu kebijakan pada dasarnya melibatkan banyak pihak/ instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, kondisi struktur birokrasi yang terlibat didalam implementasi suatu kebijakan turut berpengaruh akan kelancaran implementasi. Selain itu dalam implementasi program BOS kondisi birokrasi yang baik akan sangat berpengaruh karena implementasi program ini cenderung melalui prosedur birokrasi yang panjang sehingga memerlukan transparansi birokrasi, apabila semua itu tidak terpenuhi maka akan timbul masalah-masalah tentang penyalurannya seperti

penyelewengan dana dengan cara memanipulasi data siswa atau penyalahgunaan dana lainnya yang secara otomatis akan merugikan banyak pihak.

c. Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan menjadi sangat penting karena keadaan masyarakat yang plural, hal ini mengakibatkan suatu kebijaksanaan dilaksanakan dalam kondisi social, ekonomi, politik dan budaya yang kompleks.

Bagi perencanaan atau pembuat kebijakan, pemahaman mengenai kondisi lingkungan dimaksudkan agar kebijakan yang dibuat menjamin ketepatan dan kelangsungan bagi implementasinya. Dengan kata lain pemahaman mengenai kondisi lingkungan merupakan dasar dalam membuat pedoman dan strategi pelaksanaannya.

d. Sikap pelaksana

Para pelaksana turut menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan BOS ini. Sikap pelaksana yang dimaksud meliputi persepsi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, penerimaan pelaksanaan yaitu semangat, kemauan dan keinginan yang kuat dari implementor untuk mensukseskan program BOS tersebut.

Untuk itu, diperlukan standarisasi penyaluran dana bantuan yang tegas dari pemerintah termasuk menyeleksi dengan ketat sekolah-sekolah yang berhak mendapatkan bantuan, agar tidak jatuh ke tangan oknum-oknum pengelola pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga

diperlukan aturan-aturan yang ketat terhadap para pelaku korupsi dengan diberhentikan dengan tidak hormat atau diturunkan golongan kepangkatannya.

e. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu proses yang harus dilakukan untuk menentukan seberapa jauh keberhasilan program yang telah dijanjikan. Komunikasi meliputi sosialisasi, penyampaian informasi dan interaksi antara masyarakat dan pelaksana kebijakan.

E.2 Pendidikan Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha manusia dalam mencari ilmu untuk meningkatkan kemampuan jasmani maupun rohani yang dilakukan secara sadar sehingga terbentuk sikap etis, kreatif, dan rasional dalam mewarisi peradaban dan mengembangkan sebagai insan sosial.

Proses pendidikan berlangsung terus menerus sepanjang waktu dan mempunyai bentuk yang berbeda-beda, serta dapat diperoleh melalui pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.

Pengertian pendidikan menurut :

▪ Mashuri⁷

“Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan jalan sadar demi pembinaan pribadi, dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia,

⁷ Mochlis, *Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan*, Depdiknas, Jakarta, 1992, hal.15

jasmani maupun rohani di dalam keluarga, sekolah, masyarakat dalam rangka pembangunan persatuan bangsa Indonesia masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila”.

- Heidjrachman dan Suad Husnan⁸

“Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut pemaknaan tujuan.”

- Sukirin

“Pendidikan merupakan suatu usaha membimbing seseorang individu agar ia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan sosialnya.”⁹

Dalam pendidikan sekolah umumnya menggunakan jenjang pendidikan dimana tahap pendidikan dilakukan secara berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan pada perkembangan anak didiknya, dari tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan. Jenjang pendidikan ini terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan dalam dunia pendidikan, jenis pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Pendidikan formal

Pendidikan formal menurut Sanafiah Faisal adalah:

“Pendidikan yang bentuknya telah tersruktur secara hierarkis, bentuk-bentuk secara kronologis dalam masalah pendidikan.”

⁸ Heidjrachman dan Suad Hasan, *Managemen Personalita*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1982, hal 70

⁹ Sanafiah Faisal, *Managemen Pendidikan*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1982, hal 70

Sedangkan menurut Noeng Muhajir, pendidikan formal diartikan sebagai berikut:

“Pendidikan yang terstruktur mengenai umur, waktu dan urutan. Pendidikan formal mempunyai kurikulum standar akademi serta sistem upah yang relatif netral.¹⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai struktur yang jelas, memiliki aturan yang ketat dan berstruktur tingkatanmya serta memiliki pengelolaan pendidikan yang teratur.dan pendidikan formal ini telah diatur pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraannya, serta memiliki fasilitas yang memadai.

Ciri pendidikan formal :

- ⊕ Diselenggarakan secara khusus bagi jenjang yang dimiliki secara hierarkis.
- ⊕ Usia siswa di suatu jenjang relatif homogen.
- ⊕ Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan.
- ⊕ Isi pendidikan (materi) lebih banyak, bersifat akademis dan umum.
- ⊕ Mutu pendidikan sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang

b. Pendidikan non formal

Menurut Sanafiah, pengertian pendidikan non formal adalah sebagai berikut :

¹⁰ Noeng Muhajir, *Kepemimpinan Adopsi Inovasi Pembangunan Masyarakat*, Rake Press, Yogyakarta, 1983, hal 42

“Pendidikan yang penyelenggaraannya pendidikannya persekolahan, isi pendidikan terprogram, ada konsekwensi materi, dan interaksi belajar yang sedikit banyak terkontrol serta adanya krendosial meskipun tidak memiliki sangsi legal.

Ciri-ciri Pendidikan Non formal adalah:

- ⊕ Diselenggarakan sengaja di luar sekolah, peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah.
- ⊕ Peserta umumnya tidak terbagi dalam jenjang.
- ⊕ Peserta tidak perlu homogen.
- ⊕ Ada waktu belajar dengan metode formal, serta evaluasi sistematis.
- ⊕ Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus.
- ⊕ Ketrampilan kerja sangat ditekankan, sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatnya taraf hidup.

c. Pendidikan Informal

Secara umum pendidikan informal diartikan sebagai pendidikan yang diperoleh manusia sejak ia dilahirkan sampai kematiannya dan dilakukan dengan sadar. Karenanya pendidikan ini penting untuk lebih mengenal diri dan lingkungannya serta mampu beradaptasi. Pendidikan ini juga akan lebih menempe manusia dalam menghadapi tantangan hidup

Pendidikan Informal menurut Sanafiah :

“Segala macam penyelenggaraan aktivitas lembaga yang fungsi pendidikannya berlangsung secara wajar dan lebih bersifat sebagai pengalaman individu mandiri dan tidak memiliki kredensial nilai.”¹¹

Ciri- ciri Pendidikan Informal:

- ⊕ Tidak diselenggarakan secara khusus.
- ⊕ Tidak diprogramkan secara tertentu.
- ⊕ Metode tidak formal.
- ⊕ Tidak ada evaluasi yang sistematis.
- ⊕ Tidak diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berfungsi memberikan bekal dasar pembangunan kehidupan, baik untuk diri pribadi maupun masyarakat. Pendidikan dasar juga berfungsi untuk mempersiapkan pelajar untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar merupakan pondasi dasar (Basic Fundamental) dari jenjang persekolahan dan pendidikan selanjutnya.

Adapun tujuan pokok dari pendidikan dasar menurut **Collier Houston, Schematz dan Walsh** adalah:¹²

- Mempersiapkan anak didik yang bermoral
- Membantu murid mengembangkan segi intelektual dan mentalnya.

¹¹ Ibid, hal 52

¹² Indra Dianti Sidi. *Manajemen Masyarakat Belajar Mengajar dan Pendidikan*. Jakarta

- Membantu pertumbuhan murid sebagai individu yang mandiri.
- Membantu murid sebagai makhluk sosial.
- Membantu murid belajar hidup dengan perubahan-perubahan.
- Membantu murid meningkatkan kreativitas.

Setiap warga Negara harus memperoleh pendidikan dasar dan tiap-tiap warga Negara diwajibkan menempuh pendidikan sekurang-kurangnya dapat membekali dirinya dengan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dasar. Pendidikan dasar dilaksanakan ketika anak berumur 6-12 tahun.¹³

Pada Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 1990 disebutkan pendidikan umum lamanya 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP atau pendidikan sederajat menurut tim pengarah dan tim materi peningkatan wawasan kependidikan guru. Ciri- ciri dari pendidikan dasar adalah:

1. Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang berarti pendidikan minimum yang berlaku untuk semua warga tanpa terkecuali.
2. Pendidikan dasar dilakukan di jalur sekolah dan di luar sekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan.
3. Pendidikan dasar berlangsung 9 tahun yaitu 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP atau sederajat.
4. Lulusan pendidikan dasar adalah setara lulusan SD pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah beserta wahananya sehingga memberikan keleluasaan gerak bagi peserta didiknya.

¹³ Endang Hana, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Diakses Online, Jakarta, 1997, hal. 24

E.3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang pendidikan. BOS adalah bantuan di bidang pendidikan yang berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Kebijakan ini dibuat mengingat semakin tingginya biaya pendidikan sehingga orang tua kesulitan untuk bisa menyekolahkan anaknya. Bantuan ini berfungsi untuk membiayai biaya operasional selama proses belajar, misalnya ketika diadakan lomba. Untuk melengkapi fasilitas sekolah seperti meja, kursi, papan tulis, ataupun dana tersebut bisa juga digunakan untuk memberikan uang saku kepada murid yang memang sangat membutuhkan. Tetapi meski ada bantuan BOS tidak berarti biaya pendidikan bisa gratis atau bebas murni. Pendidikan akan gratis apabila Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) suatu sekolah sama dengan atau di bawah dana BOS. Sedangkan bagi sekolah yang RAPBS nya diatas BOS, kemungkinan besar masih belum gratis. Karena pihak sekolah harus terus mencari dana tambahan lain dari masyarakat, seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP).

Tidak jauh beda dengan berbagai bantuan lainnya, adanya bantuan BOS ini juga banyak memicu banyak penyelewengan-penyelewengan yang terutama dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing, yaitu dengan cara memanipulasi data jumlah siswa, dan manipulasi data jumlah sekolah dan penyimpangan pemanfaatan dana BOS. Untuk itu perlu dibentuk struktur pengawasan publik dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi terkait dengan BOS.

dana BOS. Selain itu, salah satu cara untuk menekan penyimpangan dalam penyaluran dana BOS adalah dengan memperkuat peran dan fungsi Komite Sekolah agar tidak hanya menjadi lembaga stempel seperti halnya BP3 sebelumnya. Mekanisme penyaluran dana BOS sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan program-program bantuan pendidikan yang dijalankan pemerintah sebelumnya. Selain sekolah, penerima BOS harus bersedia diaudit oleh auditor yang ditunjuk pemerintah, komponen biaya yang dibiayai dana BOS juga sudah dicantumkan.

a. Pelaksanaan Implementasi program BOS di Kab. Kulonprogo

Tahap-tahap pelaksanaan implementasi BOS adalah sebagai berikut :
Memobilisasi lembaga dan SDM yang akan terlibat dalam proses implementasi, Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap pihak-pihak yang akan menerima bantuan dana dan siapa saja yang terlibat dalam penyalurannya, Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, rawan putus sekolah, maupun tidak sekolah, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan fungsi dari program BOS.

b. Mekanisme pelaksanaan program BOS.

Mekanisme Pelaksanaan program terdiri dari :

- Mekanisme akokasi dana BOS
- Penyaluran dan pengambilan dana BOS

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kegiatan ini dilakukan untuk pemantauan dan supervisi, pembinaan dan penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program BOS, secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, acara dan penggunaan yang tepat.

d. Perpajakan BOS

Perpajakan merupakan bentuk pertanggung jawaban penerima dana BOS kepada Pemerintah.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan suatu pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman. Definisi konsep digunakan untuk menjelaskan makna kata-kata yang tertera dalam judul. Adapun batas pengertian konsepsional adalah:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah pilihan atau tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan pelaksanaan dari kebijakan yang berbentuk program yang telah ditetapkan dengan menggunakan berbagai macam sumber daya dalam suatu pola yang terintegrasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang baik melalui pendidikan formal dan non formal yang digunakan sebagai pendukung utama dalam melaksanakan segala aktivitasnya agar mudah, lancar dan tepat waktu dalam menyelesaikan pembangunan yang akan dilaksanakannya.

4. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

5. Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

BOS adalah bantuan dana yang berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bidang pendidikan.

G. Definisi Operasional

Menurut Syaifudin Anwar, definisi operasional adalah bahasa atau definisi suatu variabel agar tidak terjadi ambiguitas yaitu memiliki makna ganda atau tidak memasukkan indikatornya yang jelas.¹⁴

1. Dasar hukum / undang-undang yang mengatur tentang kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

- Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

2. Pelaksanaan program BOS di kabupaten Kulonprogo.

- a. Memobilisasi kelembagaan dan potensi SDM dalam pelaksanaan program BOS.
- b. Melaksanakan pendataan dan pengamatan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan implementasi BOS.
- c. Menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya anak usia 7-15 yang putus sekolah, maupun tidak/belum sekolah.
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait dengan implementasi program.

3. Mekanisme pelaksanaan program BOS.

- Mekanisme pelaksanaan yang terdiri dari : Mekanisme alokasi dana, penyaluran dan pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Perpajakan BOS

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- Sumber Daya meliputi; sumber dana, SDM, sumber daya buatan.
- Struktur birokrasi meliputi; koordinasi, tingkat kewenangan.
- Kondisi lingkungan meliputi; jumlah siswa, jumlah sekolah, pendapatan rata-rata orang tua.
- Sikap pelaksana meliputi; persepsi pelaksana, kebutuhan dan sosialisasi pelaksana program yaitu pemerintah

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah merupakan cara untuk melaksanakan penelitian dalam taraf pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta atau arsip-arsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah. Dalam hal ini metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian dimana meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri :

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- b. Data yang dikumpulkan disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan¹⁵.

¹⁵ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 62

2. Unit Analisis Data

Unit analisa data adalah satuan terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini. Maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Berdasar substansi tersebut maka kepala bagian luar sekolah, kepala bagian pendidikan dasar, kepala bagian perencanaan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang akan diminta informasinya untuk dijadikan data sebagai basis data.

3. Jenis Data.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian, khususnya diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kulon Progo.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur yang berupa kutipan dari media massa, buku-buku, internet, arsip-arsip dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dengan maksud supaya data-data yang dikumpulkan akan relevan dengan permasalahan yang diteliti serta penulis akan menggunakan studi pustaka atau teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data-data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung Tujuannya untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan yang lebih jelas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

b. Dokumentasi

Merupakan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literature yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan Selanjutnya

menganalisa gejala yang ada serta turut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

Menurut Winarno Surachmad, penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya¹⁶.